



DIREKTORAT INFORMASI DAN MEDIA

PRESS CABLE

NOMOR : 240/30122008
HARI : SELASA
TANGGAL : 30 DESEMBER 2008

DAFTAR ISI

		Halaman
I.	INTERNASIONAL	
	LAPORAN AKHIR TAHUN INTERNASIONAL: Obama Menginspirasi Dunia	3
	Muslim Menggalang Persatuan	4
	RI condemns Israeli air raids on Gaza Strip	5
	Indonesia should focus on humanitarian assistance: Wirayuda	6
	Pro-Thaksin Duduki Parlemen	6
II.	NASIONAL	
	A. POLITIK	
	KPK Ingatkan soal Korupsi Pemilu	7
	B. EKONOMI	
	Nuclear power for France, but not RI?	8
	Investasi 2009 US\$ 12,9 Miliar Produksi Minyak Lewati Target	8
	Patok Rupiah untuk Atasi Krisis	9
	KERJA SAMA BILATERAL Indonesia Tetap "Ngotot" FTA dengan Selandia Baru	9
	C. SOSBUD	
	Wisatawan Asing ke Bali Kembali Meningkatkan	10

	D. HANKAM		
		Kontingen TNI Kongo Terima Peralatan Baru	10
	E. HUKUM		
		Tolok Ukur Penegakan Hukum	11
	F. OLAHRAGA		--
	G. LINGKUNGAN HIDUP		
		Negara Memimpin Perusakan Ibu Pertiwi	11
III.	ARTIKEL		
		Low intensity conflicts and the future wars (by Wibawanto Nugroho)	12
IV.	LAIN-LAIN		--
V.	EDITORIAL		
		An Unjust War	13
		Damai Makin Jauh di Palestina	14

Jakarta, 30 Desember 2008
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media

I. INTERNASIONAL :

1. LAPORAN AKHIR TAHUN INTERNASIONAL: Obama Menginspirasi Dunia

Tahun 2008 adalah tahunnya Barack Obama. Bukan apa-apa, sebab pria Afro-Amerika kelahiran 4 Agustus 1961 ini mampu menyedot perhatian dunia sepanjang tahun 2008. Kemunculannya yang tiba-tiba hingga mampu memenangkan pemilu presiden di negara adidaya Amerika Serikat (AS) merupakan pelajaran demokrasi bagi dunia.

Obama, figur multikultural dan multirasial dari ayah asal Kenya dan ibu Hawaii (AS), serta sempat tinggal di sejumlah negara ini, mampu menginspirasi dunia bahwa warna kulit, suku, atau etnisitas bukan halangan untuk menggapai jabatan tertinggi. Obama telah meruntuhkan credo M-W-P-A di AS.

Maklum saja, dalam sejarah politik AS, ada semacam credo yang mengharuskan hanya M-W-P-A yang bisa menjadi pemimpin politik tertinggi di negara tersebut. MWPA adalah singkatan dari male (laki-laki), white (kulit putih), Protestan (beragama Protestan), dan Anglo-Saxon (berasal dari nenek moyang Eropa, khususnya Inggris).

Tak heran jika dari 43 Presiden AS tidak pernah ada yang kulit berhitam atau kuning. Belum ada wanita yang jadi presiden atau wakil presiden. Belum ada orang Amerika keturunan Afrika atau Asia yang duduk di Gedung Putih. Memang pernah ada John F Kennedy yang beragama Katolik jadi presiden, tapi kemudian dia ditembak di Dallas.

Oleh sebab itu, kemenangan Obama dalam Pemilu Presiden AS 2008 seolah meruntuhkan credo politik tersebut. Obama memang laki-laki, tapi dia berkulit hitam dan berasal dari Afro-Amerika. Meskipun dia sudah mengumumkan beragama Protestan, tetap saja dihubungkan dengan latar belakang masa kecilnya yang pernah bersekolah di Indonesia, bahkan dituding bersekolah di "madrasah muslim radikal."

Jadi, kemenangan Obama merupakan tonggak sejarah baru dari sistem politik di AS. Kemenangan Obama menjadi catatan penting bagi pembangunan demokrasi di AS, khususnya sebagai kampiun demokrasi di dunia. Pemilu AS telah memberi inspirasi bagi dunia bahwa demokrasi tidak mengenal suku, ras, agama, gender alias antidiskriminasi.

Sayangnya, kemenangan Obama acap dikaitkan dengan romantisme masa lalunya yang sempat tinggal di Jakarta selama beberapa tahun. Kemenangan Obama seolah menjadi jaminan bahwa Washington akan segera menempatkan Indonesia dalam daftar negara yang harus mendapat prioritas tertinggi.

Padahal, seperti diingatkan analis politik luar negeri Prof Dr Dewi Fortuna Anwar, justru di bawah komando Presiden Obama--yang notabene merupakan pemerintahan Partai Demokrat--berbagai kerja sama ekonomi dan perdagangan akan semakin ruwet. Pemerintah AS menjadi lebih "rewel", baik untuk urusan yang berkaitan dengan demokrasi, HAM, maupun lingkungan.

"Sebab, bagaimana pun Obama itu bukan Presiden Indonesia, tetapi Presiden Amerika. Jadi, yang bisa memperjuangkan kepentingan Indonesia ya tetap Indonesia," kata Profesor Riset Bidang Intermestik Puslit LIPI ini kepada Suara Karya di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dewi mengakui, kemenangan Obama mampu mengubah persepsi rakyat Indonesia terhadap AS. Selama ini pemerintahan AS di bawah Presiden George W Bush sangat tidak populer di mata rakyat Indonesia, khususnya akibat kebijakan Bush di Afghanistan dan Irak.

"Nah, dengan Obama terpilih sebagai presiden, maka persepsi negatif terhadap Amerika ini saya kira akan berkurang secara drastis," ujarnya. Itu karena Obama selain cukup dikenal di Indonesia, juga menjanjikan ada kebijakan baru dalam hubungan luar negeri AS. Kebijakan yang lebih mengedepankan kerja sama multilateral, mengedepankan dialog, dan mengedepankan

kemitraan internasional. Tidak mengedepankan kekuatan militer atau mengandalkan unilateralisme dan sebagainya.

Namun, Dewi juga mengingatkan, kebijakan pemerintah AS itu hanya akan berubah dalam style. Dalam substansinya, AS tetap saja AS: negara adidaya yang ingin kebebasan dan keleluasaan yang seluas-luasnya.

"Terus terang saja, kalau dalam bidang politik, keamanan, dan diplomasi, saya sangat percaya bahwa akan ada era baru dalam hubungan dengan Amerika Serikat. Tapi dalam bidang ekonomi, perdagangan, lingkungan hidup, dan hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup sehari-hari, saya kira Amerika tetap Amerika Serikat, siapa pun yang memerintah," katanya.

Artinya, kata dia, jangan terlalu berharap bahwa dengan terpilihnya Obama maka Indonesia akan lebih mudah melakukan ekspor ke AS. Justru di bawah pemerintahan Obama, kemungkinan akan lebih banyak pembatasan perdagangan alias trade barrier.

"Kenapa? Karena pemerintahan Demokrat ini biasanya didukung oleh aktivis HAM, aktivis lingkungan hidup, demokrasi, dan sebagainya. Mereka juga sangat peduli dengan lapangan pekerjaan di Amerika sendiri. Mereka tidak akan mau, misalnya, barang-barang murah dari luar negeri membanjiri Amerika. Apalagi ketika ekonomi mereka menghadapi krisis," katanya.

Ditanya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menghadapi hal ini, Dewi menilai perlunya merapikan proses produksi. "Jangan ada yang menghambat. Semuanya harus sesuai dengan standar internasional. Misalnya dalam hal food security," katanya. (Suara Karya)

2. Muslim Menggalang Persatuan

Sejak Israel menyerang Gaza tiga hari lalu, protes anti-Israel terjadi di segala penjuru dunia, terutama di negara-negara Muslim dan dunia Arab. Bahkan, beberapa negara telah menggalang bantuan dana dan tenaga sukarela untuk membantu perjuangan rakyat Palestina dalam menghadapi Israel.

Ribuan warga Iran didampingi para pejabat pemerintah dan militer bersama-sama turun ke jalanan dan memprotes serangan Israel, Senin (29/12). Banyak yang membawa spanduk bertuliskan "Israel harus dihapuskan dari muka bumi" dan "Kita harus bangkit, bersatu bersama-sama menghancurkan Israel". Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei pun mengajak kaum Muslim di dunia untuk menghukum bangsa Israel.

Ratusan warga Irak pun melakukan protes anti-Israel di Baghdad dan salah satu kota Syiah, yakni Kufa. Para pengikut tokoh radikal yang anti-AS, Moqtada al-Sadr, turun ke jalanan kota Sadr City dan membakar bendera Israel. Pemerintah Irak juga secara resmi mengecam serangan Israel yang dianggap keterlaluan dan tak berperikemanusiaan itu.

Situasi yang sama juga terlihat di Beirut, Lebanon. Puluhan ribu pendukung Hezbollah protes segera setelah pemimpin Hezbollah, Hassan Nasrallah, mengajak warga Muslim di seluruh dunia untuk bangkit dan menunjukkan solidaritas kepada rakyat Gaza.

Di Afganistan, kelompok Taliban juga mengajak seluruh umat Muslim di dunia bersatu dan bersama-sama menyerang Israel sebagai tindakan balasan atas operasi militer Israel ke Gaza yang menewaskan lebih dari 300 warga Palestina. Taliban mengecam AS dan Eropa karena tak segera membantu menghentikan serangan Israel.

Serangan Israel ke Gaza juga membuat masyarakat Indonesia geram. Kecaman dan usulan bermunculan dari aksi-aksi protes di sejumlah daerah, seperti Gresik, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Serangan Israel itu dikatakan sudah menunjukkan dengan jelas siapa teroris yang sesungguhnya. Israel dinilai melanggar perjanjian damai dan tak mematuhi resolusi.

Ratusan warga dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera juga menilai, Israel tidak pernah menggubris kecaman dunia, bahkan dengan arogan terus mengulangi tindakan itu dengan alasan sepele. Tindakan Israel merupakan kejahatan perang yang tidak bisa dibiarkan. Untuk itulah, para demonstran menuntut PBB agar menjatuhkan sanksi kepada Israel. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS DI Yogyakarta Ahmad Sumiyanto mengajak umat Islam bersatu membantu perjuangan rakyat Palestina. Tak hanya sumbangan tenaga dan pikiran, tetapi juga pengumpulan dana.

Protes anti-Israel juga terjadi di negara-negara lain, seperti Jordania, Suriah, Mesir, Inggris, Spanyol, Perancis, Turki, Swedia, dan Denmark. Di beberapa negara terjadi bentrokan antara polisi dan pemrotes. Bendera Israel dan AS terlihat dibakar di depan Kedutaan Besar AS. Protes yang semula damai berubah rusuh di Inggris. Belasan orang ditahan polisi.

Selain memberikan dukungan, Iran juga mengirimkan tenaga sukarela untuk melawan Israel. Perekrutan tenaga sukarela dari Iran mulai dilakukan kelompok pelajar garis keras.

Seperti halnya Iran, Front Pembela Islam di Indonesia juga berencana merekrut sekitar 1.000 tenaga sukarela ke Jalur Gaza. "Calonnya harus memiliki kondisi fisik yang baik, kuat, keyakinan kuat, dan siap mati. Mereka akan dibekali tiket sekali jalan sampai kita berhasil mengalahkan Israel" kata Sekjen Front Pembela Islam Ahmad Soebri Lubis.

Stop serangan

Komunitas internasional mendesak Israel untuk menghentikan serangannya di Gaza. Pemerintah China berharap Palestina dan Israel dapat mengakhiri pertikaian melalui proses dialog, bukan dengan jalan kekerasan.

Hal senada diutarakan Jepang yang meminta kedua pihak berusaha menahan diri. Sementara Malaysia mendesak PBB agar segera bertindak dan mewujudkan perdamaian di Gaza.

Untuk menunjukkan keprihatinan sekaligus "menghukum" Israel, Pemerintah Afrika Selatan memanggil Duta Besar Israel untuk Afrika Selatan Dov Segev-Steinberg. Dalam pernyataan tertulis dari Departemen Luar Negeri Afrika Selatan, Israel didesak menghentikan serangan secepatnya dan segera kembali duduk berunding dalam proses perdamaian tanpa persyaratan apa pun.

Pernyataan berbeda datang dari Kanselir Jerman Angela Merkel. Ia menuduh Hamas menjadi penyebab meningkatnya gejala kekerasan di wilayah Gaza. Merkel dan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert sama-sama sepakat, Hamas yang paling bertanggung jawab atas situasi yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Pasalnya, Hamas secara sepihak merusak kesepakatan gencatan senjata dengan menembakkan mortir dan roket ke wilayah Israel.

Pemerintah AS juga meminta Hamas menyepakati kesepakatan gencatan senjata yang berkelanjutan. "Untuk menghentikan gejala kekerasan, Hamas harus segera menghentikan tembakan roketnya," kata juru bicara Gedung Putih, Gordon Johndroe. (Kompas)

3. RI condemns Israeli air raids on Gaza Strip

Indonesia has demanded the UN issue a formal resolution to condemn Israeli air raids on the Gaza Strip and urge it to end the strikes that have left more than 300 Palestinians dead.

President Susilo Bambang Yudhoyono joined the chorus of condemnation from leaders around the world over the air attacks that began on Saturday and resulted in the bloodiest days the Palestinians have seen in more than 20 years. Yudhoyono called for immediate action from the world community and the UN to force Israel to stop the attacks.

"I have written a letter to the UN secretary-general and the UN Security Council president condemning the Israeli attacks that are unproportional and have claimed huge numbers of lives and material," he said at a press briefing, as anti-Israel demonstrators took to the streets nationwide.

The President underlined the need for the Security Council to set up a formal meeting to issue a resolution forcing Israel to stop the attacks and urging both sides to return to peace talks as stipulated in the 2007 Annapolis agreement, which helped maintain an uneasy peace in the region over the past six months.

"I am aware the UN has held an informal meeting, producing a written statement from the Security Council president. But Indonesia wants the council to hold a formal meeting to issue a resolution to force Israel to stop the attacks," Yudhoyono said.

Indonesia has pledged US\$1 million in cash aid, with another \$2 million in medical supplies. UN Secretary-General Ban Ki-moon issued a statement saying he "deplored that violence is continuing today", and strongly urging "once again an immediate stop to all acts of violence".

The UN Security Council issued a nonbinding statement calling for "an immediate halt to all violence" in the Gaza Strip, where the air strikes are in their third day and Israeli tanks are massing on the border.

Yudhoyono's statement was welcomed by the House of Representatives, Islamic organizations and civil society groups across the country.

"It's time for the UN and the world community to get tough on Israel. The attacks can no longer be tolerated," legislator Theo Sambuaga of the House's Commission I on foreign affairs said. Muhammadiyah chairman Din Syamsuddin demanded the UN place sanctions on Israel, which he said had committed gross human right violations.

Suripto, a legislator and the chairman of the National Committee for Palestinian People, also urged the UN Human Rights Council to bring Israel to the International Criminal Court over the attacks.

Anti-Israel demonstrations took place across the country on Monday, with more than a thousand people rallying in Jakarta. Hard-line Islamic groups, including the Islam Defenders Front (FPI), have recruited volunteers to be sent to Palestine to fight.

"Go to hell, Israel! Israel is a terrorist!" the protesters shouted during their rally at the Hotel Indonesia traffic circle in Central Jakarta.

Suripto said up to a million people would gather on Tuesday in front of the Egyptian Embassy in Central Jakarta to demand the country open its doors to Palestinian refugees. (The Jakarta Post)

4. Indonesia should focus on humanitarian assistance: Wirayuda

Foreign Minister Hasan Wirayuda said Tuesday the government and Indonesian citizens should focus on providing humanitarian assistance to the Palestinians in Gaza.

"Our brethren are suffering no doubt, but our intention (in helping out) needs to take into account the situation on the ground. (Gaining) access and channels to the area is not easy," Wirayuda said, as quoted by *tempointeraktif.com*.

"Perhaps it would be better if we concentrated our efforts in alleviating their suffering, particularly through delivering humanitarian assistance," he said, adding such assistance would be made available to all Palestinians and not just members of Hamas.

Social Services Minister Bachtiar Chamsyah added his ministry was still trying to coordinate with the Religious Affairs Ministry while observing developments in that region.

"I don't suggest we rush into things. However, if people here want to provide humanitarian assistance to the Palestinians by fund-raising, the Social Services Ministry does have a role to play and we would help deliver the assistance, God-willing," Chamsyah said. (The Jakarta Post)

5. Pro-Thaksin Duduki Parlemen

Ribuan demonstran Thailand kemarin memblokir pintu masuk menuju gedung parlemen di Bangkok.

Mereka juga mendesak Perdana Menteri (PM) Abhisit Vejjajiva membatalkan pidato pemaparan paket kebijakan di depan anggota legislatif. Para demonstran yang mengenakan atribut berwarna merah merupakan pendukung PM terguling Thaksin Shinawatra yang tergabung dalam Aliansi Demokrasi melawan Kediktatoran (DAAD).

Mereka berjanji menduduki gedung parlemen sampai tuntutan mereka dikabulkan. Mereka mendesak Abhisit membubarkan lembaga legislatif dan menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu). Demonstran DAAD memperbolehkan Abhisit dan anggota kabinetnya masuk ke gedung parlemen dengan berjalan kaki tanpa mengendarai mobil.

"Kalau mereka (anggota legislatif) ingin memasuki gedung, mereka harus berjalan melewati kami, termasuk perdana menteri," ujar Chatuporn Prompan, salah satu pimpinan DAAD. Namun, pejabat setempat menyatakan, situasi ini tidak aman bagi anggota legislatif.

"Pemerintah telah memberitahukan kepada saya bahwa mereka tengah berkoordinasi dengan para demonstran dan meminta saya untuk menunda (pidato PM)," ungkap Ketua Parlemen Chai Chidchob. Chai menambahkan, pihaknya belum memastikan sampai kapan penundaan itu dilakukan.

Menurut Chai, pidato Abhisit tersebut kemungkinan besar ditunda sampai hari ini atau Kamis mendatang. Sesuai jadwal, Abhisit seharusnya berpidato di depan anggota parlemen pada pukul 9.30 pagi waktu setempat kemarin. Namun, rencana itu berubah menjadi 14.00–15.00 waktu setempat sebelum akhirnya dibatalkan.

Aksi demonstrasi ini ternyata mengganggu kinerja pemerintahan baru pimpinan Abhisit. Menurut konstitusi di Thailand, pemerintah baru belum dapat memulai tugasnya sampai PM menyampaikan kebijakannya di depan anggota legislatif dan senat. Polisi Bangkok memperkirakan jumlah para demonstran mencapai 9.000 orang.

Jumlah tersebut menurun dibandingkan aksi serupa, Minggu (28/12) malam, yang mencapai sekitar 20.000 orang. Para demonstran pendukung Thaksin itu menuduh Abhisit yang juga pimpinan Partai Demokrat menggulingkan pemerintahan. Mereka tetap bersikeras akan menekan pemerintah baru untuk mempercepat pelaksanaan pemilu.

"Kami akan tetap tinggal di sini (gedung parlemen) sampai Abhisit membubarkan lembaga legislatif," tandas Nattawut Saikuar, pimpinan DAAD lainnya. Tuntutan serupa juga dilayangkan Chalerm Yoobamrung, pimpinan di Partai Puea Thai yang mendukung Thaksin.

Chalerm menyerukan, pemerintah baru segera membubarkan anggota legislatif dan menyerahkan kembali kekuasaan di tangan rakyat. DAAD mulai melancarkan aksi unjuk rasa sejak Minggu (28/12) di gedung parlemen. Sebagian dari mereka memilih bertahan di luar gedung tersebut. Sementara ratusan demonstran lain mulai berdatangan dengan bus kemarin pagi. Mereka menuding Abhisit sebagai pemimpin diktator.

"Kami di sini demi demokrasi," ungkap Narumol Thanakarnpanich, 53, profesor dari Bangkok. "Kami menginginkan sebuah pemerintahan baru," imbuhnya. Demonstrasi kali ini mirip dengan aksi yang dilancarkan kelompok anti-Thaksin dalam Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD) beberapa bulan terakhir.

PAD yang selalu mengenakan atribut berwarna kuning berhasil menduduki Gedung Pemerintahan dan dua bandara di Bangkok. Sementara DAAD mulai melakukan aksi pendudukan di Gedung Parlemen. Chatuporn menyangkal kelompoknya telah melakukan pendudukan di Gedung Parlemen.

Dia menegaskan, pihaknya hanya ingin siapa yang memasuki gedung tersebut harus berjalan kaki. Aksi demonstrasi ini semakin menunjukkan perpecahan politik di Thailand menjadi dua kubu, pendukung dan anti-Thaksin. Pada pidato pelantikannya, Abhisit berjanji akan mempersatukan kedua kubu politik yang saling berseteru itu.

"Pemerintah tidak akan menggunakan kekerasan untuk membubarkan demonstran. Kami akan meneruskan negosiasi," ujar Abhisit dalam jumpa pers sesaat setelah pidatonya dinyatakan diundur, kemarin. Selama setahun, Thailand telah memiliki empat perdana menteri dan mengalami protes jalanan selama berbulan-bulan, termasuk pemblokiran di bandara utama Bangkok. (Koran Sindo)

I .

NASIONAL :

A. POLITIK :

1. KPK Ingatkan soal Korupsi Pemilu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pemerintah dan masyarakat untuk mencermati kemungkinan penggunaan uang negara, baik dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), untuk kepentingan biaya Pemilihan Umum (Pemilu) 2009.

Alasannya, penggunaan kedua anggaran negara itu untuk kepentingan pemilu sangat riskan terjadi, apalagi jika berkaca pada beberapa kejadian kasus korupsi yang selama ini ditangani KPK. "Peluang digunakannya uang negara sangat mungkin menjelang Pemilu 2009.

Apalagi jika berkaca pada kasus korupsi yang ditangani selama ini," kata Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Chandra M Hamzah di selasela acara Evaluasi Total Indonesia 2008 dan Outlook 2009 dan Pergerakan Kaum Muda Indonesia, kemarin di Jakarta.

Menurut Chandra, sejumlah kasus korupsi yang ditangani KPK periode 2003– 2004 banyak melibatkan pejabat di tingkat daerah maupun pusat. Umumnya mereka adalah sejumlah incumbent yang kembali mencalonkan diri menggunakan dana APBN atau APBD.

"Kalau kita lihat, kasus korupsi besar terjadi pada kurun 2003–2004. Nah, apa ada korelasinya dengan pemilu? Beberapa ahli sudah menyampaikan dan ini pandangan yang berbahaya, harus dicermati oleh pemerintah," kata Chandra.

Selaku pemimpin lembaga yang mengupayakan pembersihan pemerintahan melalui upaya pemberantasan korupsi, dia berharap Pemilu 2009 bisa berlangsung tanpa politik uang yang mengotori proses demokrasi. "Kita semua berharap, pemilu berlangsung bersih dan politik tidak dibiayai dari uang-uang hasil korupsi," ujarnya.

Chandra berharap pada 2009 tidak ada lagi penyelewengan APBN dan APBD, apalagi untuk kepentingan politik. Dihubungi terpisah, Koordinator Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengapresiasi perhatian dan peringatan dari KPK tersebut.

Apalagi selama ini banyak penyelewengan uang negara oleh para pejabat baik pusat maupun daerah berasal dari APBD dan APBN. "Kita sangat sependapat dengan KPK. Banyak uang negara yang diselewengkan pejabat negara untuk kepentingan kampanye pemilu. Ini harus dicegah dan jangan sampai terulang," ujarnya. (Koran Sindo)

B. EKONOMI

:

1. Nuclear power for France, but not RI?

France is very dependent (77.4 percent) on nuclear energy to meet its national power supply needs. While nuclear technology remains, and will continue to remain controversial for many people, including in Indonesia, it is tempting to ask: When can the world produce ideally safe nuclear power?

I did feel scared, when the EDF's Penly nuclear power plant managing director Andre Van-Spaandonck told me, and other journalists from Indonesia, Singapore, Malaysia, South Korea and Vietnam, to feel the atmosphere inside the nuclear power plant building.

How about the risk of nuclear radiation? The procedure for the trip was very tight, starting from the requirement to wear special equipment and the obligation to deposit our passports.

"This is totally safe," said our tour leader.

The Indonesian government plans to build four nuclear units to produce 4,000 MW of electricity at the Muria Peninsula, in Central Java. Work on the first site may be started as early as 2010. The total cost is said to be about Rp 70 trillion. The plan has sparked public protests. The peninsula is located near the Muria volcano.

"Our nuclear plant is safe when there is a 7.0 Richter scale earthquake," said the tour leader, a nuclear expert.

The Penly plant, located in Normandy, produces 1,300 MW. It is only one of 58 nuclear power plants across France. The plant is located in a rather remote area. Farms and housing are located not very far from the plant. The plant is also visited by thousands of visitors, mostly students, every year, as part of French government efforts to maintain public confidence in the controversial power source.

Today, 77.4 percent of France's electricity needs (489 TWh) are supplied by 58 nuclear plants. France even exports 12 percent of its nuclear-powered electricity to neighboring countries. Other nuclear sites are located in Paluel, Cateu, Blayais, Fessenheim, Cruas and other areas.

The company however said that although nuclear power will play a major role in providing energy supply in the future, after fossil fuel power generation, and renewable energy including hydro, wind, solar and biomass, "the hurdles of political and public concerns (over nuclear energy) are difficult to meet. Ultimately, fossil fuels-- coal and natural gas, will need to take a major role."

Leaving the Penly site, I had mixed feelings. On the one hand, nuclear power is perhaps one of the solutions that could help overcome Indonesia's acute power shortages.

But when I remember the Lapindo mud flow disaster in East Java, and sea, land and air accidents which were mostly caused by human errors. I do doubt that we can free the nuclear plant -- if it is really built in Indonesia -- from fatal human errors. (The Jakarta Post)

2. Investasi 2009 US\$ 12,9 Miliar Produksi Minyak Lewati Target

Realisasi produksi rata-rata minyak mentah Indonesia mencapai 988.000 atau melewati target APBN-Perubahan (APBN-P) 2008 yang ditetapkan sebesar 977.000 barel per hari dan kondensat 2008 mencapai 988.000 barel per hari atau belum juga bisa menembus satu juta barel per hari.

Kepala BP Migas R Priyono mengatakan, meski belum dapat mencapai satu juta barel per hari, angka tersebut sudah 101 persen dari yang ditargetkan.

"Untuk kemarin (Senin, 22/12-red) saja produksinya 980.000 barel per hari. Dengan produksi sebesar 978.000 barel per hari, lifting 2008 mencapai 927.000 barel per hari, atau sesuai dengan APBNP 2008," katanya dalam jumpa pers akhir tahun BP Migas di Gedung Patra Jasa, Jakarta, Selasa (23/12).

Sementara untuk 2009, produksi dan lifting nasional ditargetkan mencapai 960.000 barel per hari. Target untuk keduanya memang sama karena tahun depan tidak ada lagi perbedaan untuk angka produksi dan lifting karena swap Conoco dan Chevron diharapkan sudah selesai. Menurut Priyono, target produksi 960.000 barel per hari ini merupakan target konservatif dan diharapkan bisa lebih tinggi dari itu.

Priyono mengakui, angka produksi ini turun ketimbang 2008 karena adanya penurunan drastis dari Chevron. Namun, di sisi lain, ada beberapa tambahan dari lapangan-lapangan andalan, seperti Cepu dengan tambahan sebesar 20.000 barel per hari. Tahun depan, sembilan lapangan migas akan mulai berproduksi.

Total produksi yang disumbang dari kesembilan lapangan ini sekitar 98.136 barel ekuivalen minyak barel per hari (BOEPD). Total produksi itu terdiri dari produksi minyak sebesar 5.336 barel per hari dan produksi gas 521,03 Million Metric Standard Cubic Foot per Day (Mmscfd). "Produksi dari sembilan lapangan ini memang kecil, tapi lumayan berkontribusi, dan diharapkan bisa ada tambahan lagi," tambahnya.

Terkait investasi, Priyono mengatakan, 53 kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) berencana investasi hingga US\$ 12,9 miliar pada 2009. Investasi ini masih bisa bertambah karena masih ada 11 KKKS lainnya yang belum memasukkan rencana investasi.

Rencana investasi KKKS tersebut tercantum dalam Work, Program, and Budget (WP&B) KKKS 2009 yang masuk ke BP Migas. Rencana investasi sebesar US\$ 12,944 miliar itu terdiri dari rencana pengeboran 1.273 sumur senilai US\$ 3,73 miliar, investasi fasilitas produksi sebesar US\$ 2,853 miliar, investasi operasi produksi sebesar US\$ 4,724 miliar, dan investasi administrasi umum sebesar US\$ 1,636 miliar. "Ini belum final karena ada 64 KKKS lagi. Jadi masih bisa naik lagi," kata Priyono.

Rencana investasi 2009 ini terbilang naik dibandingkan realisasi belanja (expenditure) pada 2008 yang hingga kuartal III tercatat sebesar US\$ 8,65 miliar. Menurut Priyono, resesi global dan turunnya harga minyak dunia nampaknya masih belum mengurangi minat perusahaan migas untuk terus berinvestasi di Indonesia. Salah satu alasannya, biaya produksi migas di Indonesia bisa dikatakan termurah di dunia, yaitu hanya US\$ 9 per barel. "Mungkin karena biaya produksi di sini paling murah ya. Hanya sekitar US\$ 9 per barel," katanya. (Sinar Harapan)

3. Patok Rupiah untuk Atasi Krisis

Pemerintah disarankan untuk mematok kurs mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) guna mengatasi dampak krisis ekonomi global saat ini.

Langkah ini sekaligus untuk meningkatkan daya beli masyarakat Indonesia. "Pematokan kurs rupiah atas dolar AS dapat dilakukan karena Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah, seperti tambang emas dan tembaga terbesar di dunia, dan penghasil gas bumi 40% di dunia," kata Hartojo Wigjowijoto dalam sebuah diskusi di Jakarta kemarin.

Menurut dia, dengan mematok kurs rupiah, seperti diterapkan di negara-negara Amerika Selatan, maka akan membuat perekonomian menjadi lebih berdaya tahan menghadapi krisis. Ini juga dapat menghindari pinjaman seperti ditawarkan lembaga keuangan dunia dalam mengatasi krisis ekonomi saat ini. (Koran Sindo)

4. KERJA SAMA BILATERAL Indonesia Tetap "Ngotot" FTA dengan Selandia Baru

Perundingan perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) Indonesia dan Selandia Baru diharapkan dimulai kembali pada Maret 2009. Perundingan dilakukan setelah penandatanganan FTA ASEAN-Australia-Selandia Baru pada Februari 2009.

"Kita harapkan bisa cepat dimulai kembali negosiasinya setelah penandatanganan FTA ASEAN-Australia-Selandia Baru. Mudah-mudahan Maret (2009)-lah," kata Dirjen Kerja Sama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan Gusmardi Bustami di Jakarta, Sabtu.

Gusmardi membantah telah terjadi ketegangan antara dua negara yang mengakibatkan batalnya perundingan tersebut. Pada pertemuan selanjutnya, kedua negara akan memerinci kesepakatan yang dibuat antara dua menteri perdagangan masing-masing. "Tidak benar ada friksi. Kita sepakat untuk melanjutkan kesepakatan antara dua menteri perdagangan kita," ujarnya.

Seperti diketahui, FTA antara Indonesia dan Selandia Baru dinilai justru banyak merugikan Indonesia. Dalam hal ini, pembebasan tarif bea masuk impor justru lebih banyak dilakukan Indonesia. Selain itu, Indonesia juga diperkirakan tidak akan banyak bisa memanfaatkan perekonomian Selandia Baru, baik terkait investasi maupun untuk industri. Jadi, ada kesimpulan bahwa Indonesia memberikan banyak komitmen, sementara balasannya tidak sebanding. Ini termasuk FTA dengan Australia.

Eliminasi

Sementara itu, FTA ASEAN-Australia-Selandia Baru yang diluncurkan pada November 2004 dan selesai pada Desember 2008 akan ditandatangani Februari 2009 pada pertemuan tingkat tinggi ASEAN.

Indonesia memberikan komitmen eliminasi untuk 10.397 pos tarif. Sedangkan 645 pos tarif lainnya diamankan dengan komitmen penurunan atau pemotongan tingkat tarif dan 117 sisanya dikelompokkan ke dalam exclusion list. Komitmen eliminasi Indonesia mencapai 93,17 persen dari

total pos tarif dengan rentang waktu 2009-2020. Sebanyak 645 lainnya diturunkan tarifnya dan 117 sisanya dikecualikan.

Sementara Selandia Baru akan mengeliminasi 97,4 persen pos tarifnya dalam kurun waktu yang sama. Namun pada saat entry in to force, eliminasi tarif akan mencapai 80 persen dan pada 2012 mencapai 90 persen, Selandia Baru juga memenuhi permintaan Indonesia untuk mempercepat penghapusan tarif produk tekstil dan pakaian yang saat ini berada di kisaran 7,75-19 persen dari semula tahun 2020 menjadi 2017 dan sejumlah kecil lainnya pada 2019. Dalam proses perundingan, Indonesia juga mendapatkan keuntungan tambahan yang akan dibahas dan disalurkan dalam forum kerja sama bilateral.

Sementara Australia menghapus seluruh bea masuk produk impor dari ASEAN mulai 2009-2015, sebanyak 91,77 persen dari total pos tarifnya diturunkan selama 2009-2010.

Selama perundingan berlangsung, Australia menargetkan pembukaan pasar produk otomotif Indonesia. Sedangkan Selandia Baru menargetkan pembukaan pasar daging sapi dan produk susu. Khusus untuk otomotif, Indonesia memberikan perlakuan yang berbeda antara Australia dan Jepang. Kesepakatan sektor otomotif dengan Australia mempertimbangkan perjanjian Indonesia dengan Jepang. "Sedikit beda karena apa yang diminta oleh Australia seperti passenger car, kita beri 2020. Bukan 2018, seperti dengan Jepang," ujar Gusmardi. (Suara Karya)

C. SOSBUD

1. Wisatawan Asing ke Bali Kembali Meningkat

Mendekati tutup tahun 2008, kedatangan wisatawan asing melalui Bandara Ngurah Rai Bali kembali meningkat, seiring banyaknya wisatawan domestik yang mulai meninggalkan Pulau Dewata.

Berdasarkan data kedatangan dan keberangkatan penumpang di Posko Terpadu Bandara Ngurah Rai di Tuban, Kabupaten Badung, Senin, selama 24 jam Minggu (28/12), arus kedatangan wisatawan asing menunjukkan peningkatan mencapai 8.021, sedangkan sehari sebelumnya 7.319 orang.

Kedatangan turis asing sempat melonjak mencapai 9.655 orang, Senin (22/12), namun selama tiga hari berikutnya hingga libur Natal hanya berkisar 6.600-7.000 orang per hari.

Menurut I Wayan Subagyarta, petugas posko dari Airport Duty Manager Bandara Ngurah Rai, selama 22-28 Desember jumlah kedatangan wisatawan asing tercatat 29.728 orang.

Peningkatan kembali kedatangan turis asing tersebut, seiring bertambah banyaknya wisatawan domestik yang mulai meninggalkan Bali. Minggu (28/12) tercatat 8.258, sedangkan sehari sebelumnya 6.548 orang. (Jurnal Nasional)

D. HANKAM

1. Kontingen TNI Kongo Terima Peralatan Baru

KOMPI Zeni TNI Kontingen Garuda XX-F yang bertugas dalam misi perdamaian PBB di Kongo menerima alat berat, seperti truk dan bulldozer, dan dua kontainer dukungan peralatan dari Markas Besar TNI.

"Alat baru ini sangat membantu tugas yang kami emban," kata Komandan Kontingen Garuda XX-F Mayor Sugeng Haryadi Yogopranowo dalam siaran pers yang diterima redaksi, Senin (29/12). Saat ini Kontingen Garuda yang terdiri dari 175 personel bertugas memberikan bantuan Zeni untuk memulihkan keadaan di Kongo pascakonflik berkepanjangan. Sugeng berharap, bertambahnya alat berat yang dimiliki akan mempermudah dan mempercepat pekerjaan yang dibebankan kepada Kontingen Indonesia. (Jurnal Nasional)

E. HUKUM

1. Tolok Ukur Penegakan Hukum

Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengatakan putusan hakim yang memvonis terdakwa perkara pembunuhan Munir menjadi tolok ukur penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) pada 2008.

Hal itu diungkap Kontras menanggapi vonis yang akan dijatuhkan hakim terhadap terdakwa mantan Deputy V Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi Purwoprandjono pada 31 Desember 2008 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

"Putusan hukum atas perkara ini (Muchdi) menjadi parameter keadilan, penegakan hukum dan HAM tahun 2008. Apakah tahun ini menjadi tahun yang gelap atau memberikan kepercayaan kepada publik," ujar Koordinator Kontras Usman Hamid kepada SINDO di Jakarta kemarin. Usman tidak ingin berkomentar banyak tentang rencana putusan perkara Muchdi. Namun, dia merasa putusan itu sesuai harapannya dengan fakta yang terungkap di persidangan. "Kami yakin hakim memutus perkara ini dengan jernih," katanya. Apa pun isi putusan majelis hakim, Kontras tetap akan terus mendorong agar kasus pembunuhan terhadap Munir ini tuntas.

Artinya, tidak sebatas menyeret Muchdi ke pengadilan. "Pengusutan kasus ini harus terus berjalan dan orang yang berperandalam kasus ini harus diungkap," katanya. Sebagaimana diketahui, PN Jaksel menjadwalkan pembacaan putusan perkara pembunuhan Munir dengan terdakwa Muchdi pada 31 Desember.

Dalam persidangan, jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Muchdi telah melakukan pembunuhan Munir dengan cara bekerja sama dengan Pollycarpus Budihari Priyanto, mantan pilot senior di PT Garuda Indonesia yang dipidana 20 tahun penjara.

Dalam dakwaan, JPU menyatakan latar belakang Muchdi membunuh Munir karena Munir telah membongkar kasus penculikan sejumlah aktivis 1997–1998 oleh tim mawar sehingga membuat jabatan Muchdi sebagai Komandan Jenderal Kopassus dicopot. JPU pun menuntut Muchdi 15 tahun penjara.

Sebelumnya, anggota tim penasihat Muchdi, Luthfie Hakim, berkeyakinan kliennya akan bebas. Pasalnya, dari hasil persidangan tidak ada fakta yang menunjukkan keterkaitan kematian Munir dengan Muchdi.

Apalagi dakwaan JPU yang menyatakan Muchdi membunuh karena motif sakit hati hanya didasarkan atas keterangan istri Munir, Suciwati, mantan anggota Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir, Hendarji, Koordinator Kontras Usman Hamid, dan anggota Imparsial Pungki Indarwati.

Luthfie mengatakan, ketidakterkaitan Muchdi dengan kematian Munir diperkuat dengan tidak berhasilnya JPU menghadirkan Budi Santoso, mantan Direktur 5.1 BIN, ke persidangan. (Koran Sindo)

F. OLAH RAGA : Tidak Ada

G. LINGKUNGAN HIDUP :

1. Negara Memimpin Perusakan Ibu Pertiwi

Saat ini laju deforestasi atau kerusakan hutan di Indonesia masih di atas 1 juta hektar per tahun. Kemudian dilaporkan pemerintah ada 24 pulau tenggelam dalam periode 2005-2007 serta kejadian banjir dan longsor yang hampir merata di semua daerah, menunjukkan negara memimpin perusakan Ibu Pertiwi melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkannya.

Demikian disampaikan Ketua Institut Hijau Chalid Muhammad, Senin (29/12) di Jakarta. "Pada akhir 2008 bahkan negara memberi dua kado berupa pengesahan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang mempercepat eksploitasi tambang dengan menjual murah serta kado pembebasan perkara pembalakan liar hutan oleh 13 dari 14 perusahaan," kata Chalid.

Belum lagi, adanya penyimpangan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 yang membatasi pemanfaatan hutan lindung untuk usaha pertambangan, meskipun berupa pengalihan fungsi hutan hanya untuk sarana dan prasarana tambang. Diungkapkan Chalid, seperti di Morowali, Sulawesi Tengah, pemerintah selama 2008 ini mengizinkan pembukaan pelabuhan usaha tambang di kawasan hutan lindung. "Kemudian di Manggarai, Nusa Tenggara Timur, masih diizinkan usaha tambang mangan di kawasan hutan lindung pula," kata Chalid.

Kemudian fakta lain, sebanyak 263 warga dalam setahun ini meninggal akibat bencana ekologis, seperti banjir dan longsor. Ada lagi berupa perizinan pemerintah untuk pengalihan fungsi hutan seluas 4 juta hektar untuk perkebunan sawit di Papua, yang juga menjadi bagian peran negara dalam merusak Ibu Pertiwi.

Chalid juga mengemukakan hal-hal tersebut dalam suatu pertemuan Evaluasi 2008 dan Outlook 2009 Pergerakan Kaum Muda Indonesia kemarin di Jakarta. Tidak hanya bidang lingkungan yang disajikan, tetapi juga meliputi masalah hak asasi manusia, politik, kelautan, ataupun sosial-budaya. (Kompas)

III. ARTIKEL

:

1. Low intensity conflicts and the future wars (by Wibawanto Nugroho)

Attacks in Mumbai have once again shocked the world. Terrorism has become one of the most pervasive and critical threats to world security in recent history. Terrorist violence has changed in recent years from an agenda-forcing and attention-getting tool of the politically disenfranchised to a significant asymmetric form of conflict employed against anything considered an adversary to economic, political, military or social aims.

It is not exaggerating to define terrorism as the calculated use of unlawful violence or threat of unlawful violence to instill fear and aimed to coerce or to intimidate governments or societies in the pursuit of goals that are generally political, religious or ideological.

Having described such radical and restless dedication in committing terrorism, we need to understand how radicalism enters into the terrorist's mind. Everything begins from the political, economic and social grievances that have led to the creation of some sort of social movement.

On many occasions Defense Minister Juwono Sudarsono has emphasized that a critical underlying factor leading to violence is the huge population which exacerbates the imbalance in economic development and corruption in the government and nongovernment sectors as well as poverty.

At this stage, radical ideology enters as the key intervening variable and source of endless courage. When splinters further their action in regular violent activities and operate independently in loose networks, terrorism begins to break away from the social movement.

Once they become clandestine, they are separated from society and are joined by the bonds of solidarity with people who share the same values and purposes. Under these conditions, they reinforce each other to take certain collective actions and at the same time they began to attack innocent people.

At this stage their activity can be mentioned as terrorism. However, based on the nature of fighting it, the usually repressive counterterrorism measures taken by authorities will unfortunately open up the possibility of adverse reactions, in which terrorists, within a certain degree, will have more courage, support and the capability to continue fighting back, thus creating more terrorism.

Thus, having seen the characteristics of terrorism and radicalism in the midst of global economic uncertainty it is very likely that terrorism will become a new form of war and the trend of low-intensity conflicts will surge in the future. Thus it is imperative as well to understand the strategic challenge that terrorism represents, as it would be imprudent to isolate it as just small tactical attacks.

The U.S. Army defines Low-Intensity Conflict as a political-military confrontation between contending states or groups below a conventional war and above the routine, peaceful competition among states. It often involves protracted struggles of competing principles and ideologies, thus ranging from subversion to the use of the armed forces.

It is waged by a combination of means, employing political, economic, informational and military instruments. Low-intensity conflicts are often localized, generally in the Third World, but contain regional and global security implications such as what happened in Bali and Mumbai in these past six years.

However, low-intensity conflicts cover a wide spectrum including combating illegal drug trafficking, terrorism and counter-terrorism, insurgency and counter-insurgency and other special operations needed to counter activities which threaten security and require a government response (whether revolutionary or nonrevolutionary, political or nonpolitical and open or clandestine).

Normally, religious, racial and social or ideological conflicts (i.e., radical terrorism) are total wars, long-term and very violent because they are low-rational conflict as compared to conventional wars among states.

In order to be successful in low-intensity conflicts, states require the simultaneous and combined commitment of political and economical resources supported by effective intelligence, law enforcement and military force at different levels during the entire process.

On the government side, victory in low-intensity conflicts can be considered achieved in situations where the threatened government is able to conquer or pacify the illegitimate arms-organized group or limit the conflict to a manageable proportion at a domestically "acceptable" cost, whose acceptance of such a cost is often subject to debate and controversy.

Given the protracted nature of low-intensity conflicts, this sort of conflict is unfortunately rarely attractive to the general public, bureaucrats or the military leaders. However, keys to be successful in overcoming the so-called "future small-scale wars" can be learned from several countries (U.K, Canada, German, France and Israel) and are characterized as follows.

First, any nation that has many organizations combating terrorism must make them subservient to one lead government ministry. But because many other ministries are also involved, there must be interagency coordination bodies to coordinate both within and across ministries.

Second, who is in charge during a terrorist incident must be clearly designated.

Third, there must be intelligence measures, national policies and military function-based systems and infrastructure that emphasize the prevention of terrorism. To achieve these policies, it is important to use a variety of strategies, including intelligence collection, police presence and such various security measures as physical barriers at the entrances to public buildings.

Fourth, executive branches must provide the primary oversight of organizations involved in combating terrorism. This oversight involves the review of programs and resources for effectiveness, efficiency and legality.

Last but not least, resource allocation must be based upon the likelihood of follow through of threats, as determined by intelligence assessments. (The Jakarta Post)

IV. LAIN-LAIN : T i d a k
Ada
V. EDITORIAL :

1. An unjust war

Whatever pretext Israel has cited for launching massive air strikes on the Palestinian-controlled Gaza strip over the weekend, the high casualty figure among civilians makes this military action totally unacceptable. By Monday morning, the supposedly surgical and high-precision air strikes had killed more than 310 people in Gaza, according to Palestinian medical officials.

More than half of these were apparently members of the Islamist faction Hamas, which has ruled the tiny strip of land -- home to 1.5 million people -- for the past three years. The others were civilian casualties, including women and children.

Add a few hundred other civilians who were injured and the air strikes make it the most devastating clash ever in the more than 60 years of conflict between the Palestinians and Israelis. Whatever chance there was for peace has now been virtually wiped out.

Just how much "collateral damage" -- the military phrase for civilian casualties caught in cross fires -- is regarded as acceptable by Israel remains unclear. But to anyone with a sense of human decency, the figure is reprehensible, and the military action must be condemned in the harshest terms. It has made this Israel's unjust war.

The Israeli military and government must have known the unintended consequences of their decision, which they claimed was grounded on the constant barrage of rocket attacks by Hamas against Israeli civilian targets across the Gaza border.

Militarily, the civilian casualty is usually considered a secondary issue that can go as high as necessary to achieve the military objectives. Politically, there has to be a limit on what is the acceptable figure of collateral damage, but again, this depends on what the Israeli political leaders had hoped to achieve when they ordered the military operation.

It is looking more likely that the decision to go for a full-scale military operation in Gaza was calculated to appease the Israeli people as the coalition government faces a general election in February.

But in the process, Israel has virtually forfeited whatever chance there was for peace. Israel cannot wash its hands that easily and lay the blame squarely on the Hamas faction for the deaths of hundreds of Palestinians over the weekend.

The air strikes have caused much more misery than that caused by the few hundred deaths and injuries among the Palestinians. Gaza, because it is controlled by Hamas, has been blockaded for much of the past three years. On Saturday morning, Israel had allowed for humanitarian assistance to be delivered, only to pound it with bombs a few hours later.

For now and the foreseeable future, peace will be the last thing on the minds of most Palestinians, and probably many Israelis, too, for that matter. Even moderate Palestinian forces who had been in discussions with the Israelis to negotiate a settlement have been outraged by the weekend attacks and many seek to avenge the deaths of their countrymen.

The U.S.'s Middle East peace initiative held in Annapolis early this year (a process of which Indonesia is also a part) is now as good as dead, thus killing the one positive legacy that outgoing

President George W. Bush had hoped to leave behind. The Oslo Agreement, under which the two sides had been discussing the prospect of a two-state solution, has also been completely derailed.

Once the international community gets past the condemnations (of Israel or Hamas), it should use its force to persuade both sides to cease and desist, and return to the negotiating table as soon as possible. This is going to be a tall order given the high emotions running among both Israelis and Palestinians. But the alternative will be worse.

In the meantime, we must brace ourselves to witness more violence and bloodshed once again. Let's hope that common sense will soon prevail and that this war will be short-lived. (The Jakarta Post)

2. Damai Makin Jauh di Palestina

Serangan Israel ke wilayah Jalur Gaza dilancarkan selama akhir pekan kemarin, dan dilaporkan telah menewaskan sekitar 300 warga Palestina.

Serangan itu menurut Israel dilancarkan karena Hamas yang menguasai Gaza terus menembakkan roket ke wilayah Israel. Meski telah menelan banyak korban, serangan yang menggunakan pesawat tempur itu kemungkinan besar belum akan diakhiri. Pemerintah Israel telah memanggil pasukan cadangan yang diduga untuk persiapan melakukan operasi darat.

Sejumlah kalangan menilai serangan Israel tampaknya untuk menegaskan kepada pihak lawan bahwa ia bukan negara lemah seperti dikesankan saat kedodoran menghadapi serangan Hezbollah tahun 2006. Kali ini serangan dilakukan dengan masif. Selain banyak korban yang jatuh, serangan menimbulkan kekalutan luar biasa. Banyak warga Gaza yang berniat mengungsi ke wilayah Mesir melalui perbatasan Rafah. Namun, pihak Mesir tegas menutup perbatasan tersebut.

Negara-negara Arab meluapkan kemarahan terhadap serangan brutal Israel. Sebagian dari mereka juga marah terhadap Mesir yang tak memberikan kesempatan kepada warga Palestina yang ingin mengungsi. Padahal, kemampuan Gaza, seperti dalam hal pengobatan, sudah amat merosot setelah 18 bulan terkena sanksi Israel.

Semua itu menimbulkan kecemasan, wilayah Timur Tengah akan kembali terjerumus ke dalam ketidakstabilan baru. Pihak Israel menyebutkan, serangan tidak dimaksudkan menduduki Gaza, yang sudah ia tinggalkan secara sepihak tahun 2005, tetapi untuk memulihkan kehidupan normal bagi penduduk di wilayah selatan negara yang terkena serangan roket Hamas.

Namun, pihak Hamas menyebut Israel-lah yang memulai "perang", dan bertekad akan membalas dengan serangan hingga "jauh ke dalam wilayah negara zionis dengan menggunakan semua cara, termasuk serangan bunuh diri". Sementara itu, di Lebanon, pemimpin Hezbollah Sheik Hassan Nasrallah menyatakan mendukung Hamas dan mempersiapkan para pejuangnya.

Dukungan bagi Hamas juga muncul dari Iran dan Suriah. Kedua negara ini dianggap berseberangan dengan Arab Saudi, Jordania, dan Mesir, yang dinilai menjalin kesepakatan menentang Hamas. Kini, gencatan senjata selama enam bulan antara Israel dan Hamas yang diperantarai Mesir sudah berakhir 10 hari lalu. Namun, situasi sudah mulai memburuk November lalu.

Kita sungguh prihatin dengan kondisi di Palestina. Jangankan ada negara merdeka, tahun 2008 pun berakhir dengan Palestina yang masih terus terbelah dan berdarah oleh gempuran Israel. (Kompas)

Jakarta, 30 Desember 2008
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media
Deplu